BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara umum dinasti politik merupakan upaya penguasa untuk menempatkan keluarga, saudara dan kerabat pada jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik dalam pemerintahan.[1] Dinasti politik menjadi sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam hubungan kekeluargaan. Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk ikut serta dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari tingkat regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realitasnya, masyarakat masih terhalang oleh status ataupun hak-hak sosial sebagai akibat dari adanya fenomena dinasti politik. Jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik ataupun pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dinasti politik ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat untuk menjadi pejabat publik.[2]

---

[1] Leo Agustinus. *"Politik Lokal dan Otonomi Daerah"*. Bandung : Alfabeta, 2014, hlm. 209-211.

[2] Susanti, Martien Herna, "*Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". Journal of goverment and civil society,* Vol. 1, No. 2, tahun 2017, hlm. 112.

Politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan, bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elit), bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabat pada sektor pemerintahan. Namun tidak hanya keluarga/kerabat, politik dinasti juga dapat memasukkan orang lain sebagai kroni yang akan bergabung dalam lingkup politik dinasti suatu keluarga. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperbanyak massa dan memperluas jaringan yang dapat dikuasai oleh suatu dinasti tersebut. Dengan begitu himpunan kekuatan kekuasaan yang dimiliki, akan semakin mudah mencapai tujuannya dan kekuasaan yang dimiliki dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, tentunya harus dengan tetap menjaga keluarga agar tetap dalam satu tujuan, begitu pula dengan kroninya.[3]

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Tetapi diera demokrasi ini, dinasti masih tetap berlaku meskipun sudah ada partai politik atau pemilihan langsung. Para pejabat politik di negeri ini sedang mempraktikkan kebiasaan para raja terdahulu. Bisa dilihat bagaimana penguasa baik dipusat maupun didaerah berlomba-lomba untuk mengangkat sanak keluarga, kerabat, saudara serta orang-orang terdekat mereka untuk mengisi jabatan-jabatan

[3] M. T. Siregar, M. A. Nasution, M. Sihombing (2021), "*Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.".* Perspektif, 10(2), 678-691.

diwilayah kekuasaannya.[4]

Terdapat pula dampak positif dan negatif tentang dinasti politik, tergantung pada proses dan hasil (*output*) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan dinasti politik yang bersangkutan. Jika proses pemilihannya murni dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat maka dinasti politik dapat berarti positif. Akan tetapi bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Tidak hanya itu positif dan negatif arti dinasti politik juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum, penegakkan hukum serta pelembagaan politik yang bersangkutan. Dinasti politik yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, serta pelembagaan politik yang belum mantap maka dinasti politik dapat berarti negatif.[5]

Dinasti politik yang saat ini telah terjadi di Indonesia dipelopori oleh partai politik. Dimana sistem partai lebih mengakomondir pihak-pihak tertentu yang diklaim dapat memberikan keuntungan bagi partai.

---

[4] Henry, Maddick, *Democracy, Desentralisasition, and Development, Bombay-Asian Publishing House*, Bandung, 2005.hlm.145

[5] Burhanuddin Muhtadi, *Perang Bintang: Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres. Noura Books* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), hlm. 30.

Tabel 1.1 Beberapa kasus politik dinasti di Indonesia

No.	Nama Keluarga	Jabatan	Politik Dinasti	Partai
1.	Keluarga Megawati	Koordinator umum partai	Megawati mengkaderkan anaknya Puan Maharani menjadi penerusnya.[6]	PDI-P
2.	Keluarga Jokowi-dodo	Presiden ke-7 Republik Indonesia	Anak pertama Jokowi-dodo menjadi walikota Solo periode tahun 2021-2026, setelah itu mencalon-kan diri menjadi calon wakil Presiden tahun 2024. Putra kedua Jokowi dodo yaitu Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PSI periode 2023-2028.[7]	Partai Solidaritas Indonesia
3.	Keluarga Susilo BambangYudhoyono	Mantan Presiden Indonesia ke 6 dan pendiri Partai Demokrat (2001).	Putra bungsu Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi anggota parlemen demokrat. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono putra sulungnya kini	Partai Demokrat

[6] Johannes Nugroho. *"Panjang Akhirat Politik Megawati Sukarnoputri"*. https://thediplomat.com/2023/02/the-long-political-afterlife-of-megawati-sukarnoputri/ diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.

[7] Adhi Baskara "*Dinasti Politik Keluarga Jokow*i", hlm: 18.

			sebagai pemimpin partai demokrat.[8]	

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa politik dinasti di Indonesia tidak hanya terjadi di satu partai politik melainkan terjadi di beberapa partai politik. Misalnya, keluarga Megawati Soekarno Putri terlibat dalam politik dinasti di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu keluarga Jokowi-dodo terlibat dalam politik dinasti di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam politik dinasti di Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa politik dinasti tidak hanya terjadi di satu partai politik tetapi dapat terjadi di berbagai partai politik. Selain itu, politik dinasti juga dapat terjadi diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya Provinsi Banten.

Di Banten dinasti politik terbentuk oleh Ratu Atut Chosiyah, naiknya Atut menjadi gubernur Banten pada 2007-2017 dan keluarga besar menduduki berbagai jabatan publik, Hikmat Tomet (suami) menjadi anggota DPR (2009-2014), Andika Hazrumy (anak) menjadi anggota DPD (2009-2014) dan DPR (2014-2019) dan Airin Rachmi Diany (adik ipar) menjadi Wali Kota Tanggerang Selatan (2011-2016). Pada 2013, Ratu Atut dan adiknya Tubagus Chairil Wardana ditangkap oleh KPK atas kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar, tentang perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

[8] https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-political-dynasties-elections-joko-jokowi-widodo-susilo-bambang-yudhoyono-megawat-sukanoputri-3251466, diakses pada tanggal 22 September 2023.

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan korupsi pengadaan sarana-prasarana alat-alat kesehatan dan pengadaan barang lainnya di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai 2013. Namun, setelah dipenjaranya Atut dan adiknya atas kasus korupsi tersebut tidak berpengaruh terhadap kemenangan keluarganya pada PILKADA serentak Banten 2015, keluarga Atut yang menang pada PILKADA Banten 2015 adalah Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut) di Kota Tanggerang Selatan.[9]

Tumbuh suburnya dinasti politik khususnya pada daerah tidak terlepas dari peran partai politik. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya.[10] Selama ini terdapat kesamaan calon kandidat oleh partai politik berdasarkan hasrat partai elit, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan serta integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus berlanjut membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik ditingkat daerah maupun pusat.[11]

---

[9] Sukri, Muhammad Alfahjri "*Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*". Vol 10, No. 2, 2020.

[10] https://unja.ac.id/oligarki-partai-politik-dalam-pilkada/ diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

[11] Neni Nur Hayati. *"Pilkada, Dinasti Politik, dan Kandidasi Partai",* https://m.mediaindonesia.com/opini/336216/pilkada-dinasti-politik-dan-kandidasi-partai diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

Gambar 1.1 Jumlah Politisi dan Jumlah Daerah yang Dikuasai Dinasti

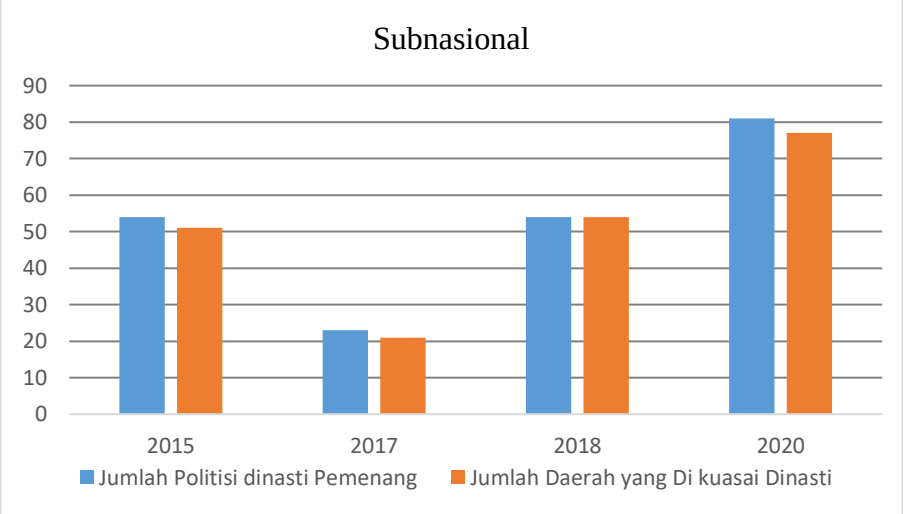

Sumber : *https://youtu.be/qyHulrTFA4U?si=1tY3_Wgm20dPFKOE*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah politisi dinasti yang berhasil memenangkan PILKADA antara tahun 2015-2020 cukup tinggi dengan total ada 212 politisi. Sementara jumlah daerah yang dikuasai dinasti dari tahun 2017-2020 terus meningkat. Hal ini membuktikan dinasti politik telah mendominasi daerah-daerah di Indonesia.

Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang diluar dinasti.[12] Berlakunya sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah menghasilkan elit-elit yang berkuasa dengan cara menggunakan simbol-simbol kekuasaan untuk memobilisasi dukungan rakyat, guna menguasai

[12] Peet, R, and Harttwick,E, *Theories of Development Contentations, Argumentation, Alternative,* Guiliford Press, 2009.

seluruh aspek kehidupan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Kemampuan elit tersebut di dukung oleh kekayaan dan kemampuan politik untuk memperoleh suara, memanipulasi, melakukan tawaran dan memobilisasi masyarakat ber-dasarkan asal usul keturunan dan hukum adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat.[13]

Fenomena dinasti politik tidak hanya ditemukan pada tingkat daerah saja, ternyata ditingkat desa juga terjadi dinasti politik. Politik dinasti ini berasal dari lingkungan keluarga kepala desa yang sedang berkuasa atau bisa dilakukan oleh salah satu keluarga dekat.[14] Desa bagi bangsa Indonesia memegang peranan yang sangat penting, jumlah penduduk Indonesia sebagian besar (80%) tinggal dipedesaan. Secara administrasi pemerintahan, pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 75.436 desa.[15]

Pada tahun 2020 dari 27 provinsi, terdapat 19 kabupaten yang melaksanakan PILKADES dengan jumlah 1.464 desa. Sementara pada tahun 2021 terdapat 5.996 desa di 86 kabupaten dan kota. PILKADA serentak tahun 2020 terdapat 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.[16] Berdasarkan data tersebut, pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak

---

[13] Ibid hal 4

[14] Mega Lestari. " *Dinasti Politik Dalam Prefektif Demokrasi*". 2021.

[15] Jopang Liwaui dan Muhammad Yunus, *"Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Desa Serentak*", Jurnal AKP 8, no. 2, (2018).

[16] https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/18010841/kemendagri-diminta-jelaskan-ke-publik-pertimbangan-tunda-pilkades-2020?page=all

di tahun 2020 dan 2021 tidak terlepas dari berbagai sengketa PILKADES, mulai dari politik uang, dinasti politik dan kecurangan lainnya yang dilakukan secara terstruktur.[17]

Desa merupakan suatu wilayah kesatuan terkecil pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang Kepala Desa. Sistem pemilihan Kepala Desa dilakukan menggunakan pemilihan secara demokratis.[18] Pada kenyataannya demokrasi itu sendiri terciderai oleh praktik-praktik dinasti politik yang sering terjadi, menyebabkan ketimpangan pada lapisan masyarakat. Semestinya masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing menjadi pemimpin, tapi terhalangi karena adanya sistem politik dinasti dimana orang-orang yang berstatus sebagai saudara atau semarga yang menjadi prioritas utama.[19]

Desa Nyogan adalah salah satu desa yang masih dipengaruhi dinasti politik, desa ini terletak di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Lebih dari 3 periode kepemimpinan keluarga Kepala Desa nyogan menduduki jabatan strategis dipemerintahan sejak awal desa ini terbentuk hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinan Kepala Desa yang berasal dari ikatan kekeluargaan, berikut

---

[17] Nur Ainun dkk. *"Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli"*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau: Vol. 10, No. 2, Agustus (2021).

[18] R. A. Pratama (2017). Patronase dan Klientalisme pada PILKADA serentak kota Kendari tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik, 2*(1), 33-45.

[19] Muhammad Taher Siregar, dkk. *"Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Mangaledang Lama Desa, Kecamatan Partibi, Kabupaten Padang Lawas Utara".* Jurnal 10 (2) 2021, hlm. 678-691.

nama-nama Kepala Desa dari masa ke masa di Desa Nyogan.

Tabel 1.2 Nama-nama Kepala Desa Nyogan dari masa ke masa

No	Nama Kepala Desa	Periode
1	Harun Muhammad Dun	1986 – 2003
2	Muhammad Asrul	2004 – 2021
3	Rosita	2021 – Sekarang

Sumber : Kantor Desa Nyogan

Tabel diatas membuktikan bahwa dinasti politik di Desa Nyogan sudah lama terjadi, adapun hal yang mendasari terbentuknya politik dinasti dapat dianalisa dari awal terpilihnya Kepala Desa Nyogan. Dalam pemilihan Kepala Desa pertama, dilakukan melalui penunjukkan oleh pemerintah yang berwenang pada saat itu. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Desa, pemilihan Kepala Desa dipilih secara langsung, umum dan rahasia. Bapak Harun Muhammad Dun merupakan Kepala Desa pertama di Desa Nyogan pada tahun 1986-2003, beliau memimpin selama 3 periode. Kemudian pada tahun 2004 Desa Nyogan melakukan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh bapak Muhammad Asrul, pada tahun 2004-2021 selama 3 periode juga. Beliau merupakan menantu dari Kepala Desa pertama. Setelah masa jabatan bapak Muhammad Asrul pada tahun 2021 – sekarang terpilih ibu Rosita yang tidak lain, adalah anak dari bapak Harun dan istri dari bapak Muhammad Asrul.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Kontestasi pemilihan Kepala Desa Nyogan selalu dimenangkan oleh elit lama, hal ini dipengaruhi oleh suku. keluarga Kepala Desa merupakan keturunan Suku Anak Dalam. Masyarakat Desa Nyogan masih sangat menghormati tokoh adat atau tetua adatnya, pada tahun 1986 terjadi pemekaran di Desa Pelempang, maka terbentuklah Desa Nyogan. Kepala Desa Pelempang pada saat itu adalah salah satu tokoh yang dikenal dengan Datuk Maliki, beliau ternyata masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kepala Desa Nyogan pertama yaitu Harun Muhammad Dun.

Dari fenomena tersebut, hipotesis penelitian ini meliputi pola terbentuknya dinasti politik di Desa Nyogan, terbentuk semenjak Kepala Desa pertama menjabat dan dalam jangka waktu yang cukup lama terjadi regenerasi kekuasaan, Kepala Desa mengayomi warga desa sehingga memiliki ikatan atau hubungan yang kuat. Selain itu, penyebab mengapa dinasti politik Desa Nyogan masih dikuasai oleh satu keluarga yakni, adanya hubungan antara patron dan klien yang dijaga sejak lama.

Gambar 1.2 Struktur dinasti politik Kepala Desa Nyogan

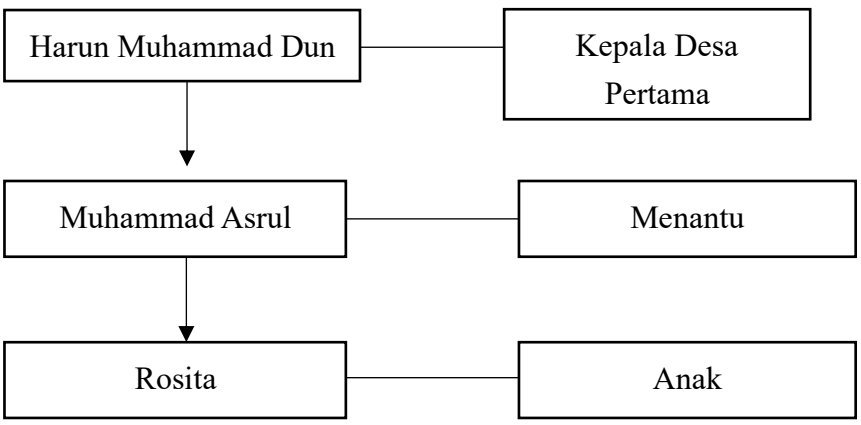

Tujuan pokok dari penelitian ini untuk menganalisis bentuk dinasti politik dan mengetahui pola terbentunya dinasti politik dan mengapa dinasti politik masih dikuasai oleh satu keluarga di Desa Nyogan. Pada pemilihan langsung Kepala Desa, hal ini menunjukan bagaimana suatu keluarga dalam mempertahankan trah ataupun dinasti politiknya dalam sebuah tata pemerintahan desa. Fenomena ini merupakan pencapaian dan kekuatan politik yang sangat terstruktur, sehingga keluarga ini senantiasa memegang jabatan Kepala Desa dalam pemerintahan di Desa Nyogan.

Adapun penelitian terdahulu dari Firman Ihsan Mawardi berjudul "Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Di Kabupaten Bogor" tahun 2021. Penelitian ini membahas bagaimana keluarga Yasin mempertahankan elektabilitasnya di Kabupaten Bogor. Dinasti politik di Kabupaten Bogor terlihat dari adanya keberlanjutan kekuasaan Rachmat Yasin, kepada adik kandungnya yaitu Ade Yasin. Tujuan penelitian, untuk mengetahui proses terbentuknya politik dinasti keluarga Yasin di Kabupaten Bogor dan bagaimana keluarga Yasin mempertahankan elektabilitasnya. Penelitian ini menggunakan teori distribusi kekuasaan. Terbentuknya dinasti politik tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan keluarga Yasin merupakan segelintir orang yang memiliki pengaruh kuat, hal ini terjadi karena keluarga Yasin mempunyai latar belakang agama islam yang kuat. Kabupaten Bogor mayoritas

masyarakatnya beragama Islam. Kemudian dinasti politik, dapat terbentuk karena adanya sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki serta distribusi kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga Yasin.[20]

Selanjutnya penelitian kedua dari Duma Asiana dengan judul " Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanggerang Selatan " tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan tentang Kota Tanggerang Selatan yang dipengaruhi oleh dinasti Atut. Keluarga Atut di Banten berhasil mempertahankan dinasti politik menggunakan strategi politik yang baik dan memanfaatkan jaringan kuasa yang telah dibangun. Dinasti politik keluarga Atut berbentuk *Octopussy Dynasty*. Sudah 2 kali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2015 dimenangkan oleh Airin Rahcmi Diany, istri dari Tubagus Chaeri Wardana atau adik ipar Atut sebagai walikota. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana dinasti politik tercipta pada PILKADA Kota Tanggerang tahun 2020, faktor apa yang membuat dinasti tersebut bertahan. Hasil penelitian terciptanya dinasti politik di PILKADA Kota Tangsel tahun 2020 tidak terlepas dari pengaruh elit Banten pada masa Orde Baru yaitu H. Tubagus Chasan Sochib yang merupakan ayah Atut Choisyah. Faktor yang mempengaruhi kekuasaan dinasti ini adalah elit, jaringan

[20] Firman Ihsan Mawardi (2021), "*Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Di Kabupaten Bogor",* Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

politik yang luas dan modal ekonomi.[21]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah keduanya meneliti dinasti politik ditingkat lokal, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bogor dan Kota Tanggerang Selatan, ternyata dinasti politik tidak hanya terjadi ditingkat lokal, di Kabupaten Muaro Jambi juga terdapat dinasti politik, tepatnya di Desa Nyogan.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"ANALISIS POLA TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK DESA NYOGAN KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola terbentuknya dinasti politik di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi?
2. Mengapa dinasti politik di Desa Nyogan masih dikuasai oleh keluarga Harun Muhammad Dun?

[21] Duma asiana (2020), "*Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanggerang Selatan Tahun 2020*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola terbentuknya dinasti politik di Desa Nyogan Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menganalis penyebab dinasti politik di Desa Nyogan masih dikuasai oleh keluarga Harun Muhammad Dun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang ada, terutama bagi mahasiswa ilmu politik dan juga bagi mahasiswa lainnya yang mungkin tertarik dengan dinasti politik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca yaitu, semakin menambah pengetahuan penulis tentang Pola Terbentuknya Dinasti Politik di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi tentang dinasti politik.

E. Landasan Teori

Guna menganalisis lebih dalam mengenai dinasti politik di Desa Nyogan, peneliti menggunakan teori yang dianggap sesuai dengan konsep pola bentuk dinasti politik.

a. Klientalisme Politik

Klientalisme merupakan suatu fenomena sosial politik, di Indonesia yang berkaitan erat dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu). Klientalisme dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) dengan pihak yang menerima (klien), didasari pemberian loyalitas oleh penerima. Terdapat perbedaan klientalisme dengan suap. Hicken beragumen bahwa suap merujuk pada transaksi yang hanya terjadi dalam satu waktu, sementara klientalisme merujuk pada hubungan transaksional yang diliterasikan atau berlanjut.[22]

Klientalisme politik terjadi ketika pemilih, para pegiat kampanye atau aktor-aktor lain menyediakan dukungan elektoral, bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi tersebut menggunakan metode klientalistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan

[22] Hicken, A., 2011. "*clientelism, Annual Review of Political Science*." Hlm : 289-310.

bantuan, barang, atau uang tunai kepada para pemilih baik individual maupun kelompok-kelompok kecil.[23]

Menurut literatur kesarjanaan dalam studi klientalisme dapat dibagi menjadi tiga aliran :[24]

1. Aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi.

Menurut pandangan ini, klientalisme digambarkan sebagai warisan zaman pra-modern dalam relasi sosial-politik. Patron-klien dinilai sebagai intrinsik dunia ketiga yang masih miskin dengan tingkat buta huruf yang tinggi (tidak modern). Padahal demokrasi hanya mungkin bisa diterapkan dalam masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang memadai.

Namun pandangan ini secara mendalam justru gagal, menjelaskan mengapa masih ada jaringan klientalistik di negara-negara yang relatif maju dengan tingkat pendidikan yang memadai. Berdasarkan studi ini, patron-klien tidak hanya ditemukan di negara berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang telah maju.

2. Pandangan kedua adalah argumen kebudayaan.

Patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya dimana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*), memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*).

---

[23] Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. "*Democracy for sale: Pemilu, Klientalisme dan Negara di Indonesia*." Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

[24] https://ejournal.politik.lipi.go.id

3. Tradisi ketiga pendekatan institusionalis.

Pandangan ini lebih menekankan institusi politik berjasa menyebarkan praktik patron-klien, misalnya pemilu yang kompetitif dan sistem multipartai.

Menurut Berenschot klientalisme yaitu dana kampanye dan keuntungan dari negara yang didistribusikan, berdasarkan hubungan terhadap dukungan elektoral. Hubungan patron-klien akan sangat dirasakan pada saat kampanye, ada berbagai macam bentuk patron-klien yang terjadi dimasyarakat menurut Edward Aspinall dalam bukunya *Democracy for sale* salah satunya ialah *vote buying*.[25]

1.) Pembelian suara *(vote buying*)

Vote buying adalah suatu pendistribusian sistematis dari kandidat kepada pemilih menjelang pemilihan umum, biasanya para kandidat akan mendistribusikan materi untuk mendapatkan suara dari pemilih tersebut. *Vote buying* merupakan strategi yang paling sering dilakukan oleh calon untuk memenangkan suara dalam pemilu.

2.) Pemberian pribadi (*individual gift*)

Bentuk individual gift merupakan pemberian barang pribadi seperti kaos, kalender yang menunjukkan jati diri kandidat. Selain itu, bisa juga berbentuk makanan dan minuman, baik berupa bingkisan atau makan bersama. Individual gift ini sering dianggap lumrah oleh masyarakat menjelang kampanye.

---

[25] Ibid

3.) Pemberian kelompok (*club goods*)

Tidak jauh berbeda dengan *individual gift,* pemberian kelompok juga upaya yang dilakukan kandidat untuk memenangkan suara dalam pemilu dengan cara memberi barang. Akan tetapi, pemberian ini ditujukan untuk kelompok di daerah yang didatanginya, seperti karang taruna, ibu-ibu PKK, organisasi kelompok, atau komunitas yang ada didaerah tersebut. Barang yang diberikan pun bersifat kelompok.

4.) Pelayanan dan aktivitas (*servis and activities*)

Para kandidat dalam upaya memperoleh simpati dari pemilih seringkali menyediakan atau memberikan dukungan biaya untuk berbagai aktivitas dan pelayanan kepada masyarakat seperti momen-momen kegiatan pengajian atau majelis taklim.

Ada hubungan resiprokal (saling menguntungkan) antara politisi dan pemilih yang disebut sebagai bentuk "akuntabilitas" yang lain, dimana politisi harus memberikan sesuatu kepada pemilihnya. Terdapat sejumlah karakteristik untuk mengidentifikasi konsep klientalisme :[26]

[26] W. Muno (2010), "*Conceptualizing and measuring clientelism. In paper to bepresented at the workshop on Neopatrimonialisme in Various World Regions, GIGA German Institute of Global and Area Studies."* (Hamburg).

1. Hubungan bersifat *dydic*.

Didalam klientalisme terdapat hubungan personal antara patron dan perantara (broker) disatu sisi, kemudian disisi lain ada perantara dengan klien. Patron dengan klien tidak mengenal secara personal. Hubungan yang ada awalnya bersifat *dydic* berkembang menjadi *triad*. .Namun, tetap bersifat *dydic* karena perantara merupakan klien bagi patron, sementara perantara juga dapat berperan sebagai patron bagi klien.

2. Hubungan bersifat asimetris.

Patron tidak hanya menguasai distribusi informasi, namun juga menguasai distribusi sumber daya, kekuasaan, uang dan barang. Kondisi ini mungkin terjadi dipedesaan.

3. Hubungan bersifat pribadi dan tahan lama.

Dalam klientalisme hubungan tidak bersifat spontan, melainkan saling mengenal dan percaya satu sama lain. Terkadang hubungan itu bersifat turun-temurun, kondisi tersebut merupakan ciri klientalisme klasik.

4. Hubungan bersifat timbal balik.

Pertukaran barang-barang yang berbentuk materi maupun non-materi, bersifat timbal balik merupakan inti dari klientalisme. Patron mengontrol sumber daya dan memberikan kepada klien, klien menerima dan menggunakan sumber

daya tersebut, kemudian menukarkan dengan sumber daya yang dimiliki. Pertukaran itu tidak harus diberikan, namun dapat dalam waktu tertentu.

5. Hubungan bersifat sukarela.

Dalam klientalisme mekanisme dukungan tidak dengan kekerasan. Artinya hubungan patron-klien ini bersifat suka rela.

Dalam memastikan distribusi materi yang akan diberikan oleh patron agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dituju, maka ada pola-pola tertentu yang dilakukan kandidat dalam melancarkan aksinya, misalnya jaringan yang melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa. Keterlibatan mereka sangat penting sebagai broker (perantara) yang menghubungkan kandidat dengan pemilih, untuk meraup suara ditingkat bawah.

Berikut adalah beberapa bentuk jaringan broker dalam mendistribusikan materi yang diberikan patron kepada klien :

a. Tim sukses

Dalam setiap berlangsungnya pemilihan Kepala Desa biasanya akan membentuk tim sukses untuk memperoleh suara terbanyak. Tim sukses bersifat personal dan bertugas untuk mempromosikan dan mengkampanyekan kandidat, biasanya orang yang dipilih menjadi tim sukses adalah orang dekat atau orang kepercayaan, bisa dari lingkungan keluarga, relasi maupun teman dekat.

b. Jaringan sosial

Keterlibatan tokoh masyarakat tidak luput dari bidikan para kandidat unruk memperoleh dukungannya, pengaruh dari jaringan sosial yang mereka miliki bisa diarahkan untuk memberikan dukungan untuk kandidat. Keberadaan tokoh masyarakat ini seringkali memiliki jabatan formal dalam sebuah institusi pemerintahan atau pun jabatan informal seperti tokoh agama, pimpinan ormas atau tokoh yang dianggap penting dalam lingkungannya.

Menurut penjelasan James C. Scott tentang ciri hubungan Patron-Klien, yaitu :[27]

- Memiliki sumber daya ekonomi yang tidak seimbang antara patron dan klien.
- Adanya hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima walaupun adanya ketidak-seimbangan dalam penerimaan atau pemberiannya.
- Memiliki hubungan loyalitas, dalam artian memiliki kesetiaan dan kepatuhan.
- Memiliki hubungan personal. Hubungan ini merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara patron dan klien. Hubungan personal tidak terjadi berdasarkan keuntungan yang bisa didapatkan oleh kedua belah

[27] James C.Scott. *Moral Ekonomi Petani*. (LP3S. Jakarta)

pihak, melainkan adanya unsur yang mengandung perasaan atau kedekatan emosional/bersifat pribadi.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran pola terbentuknya dinasti politik Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

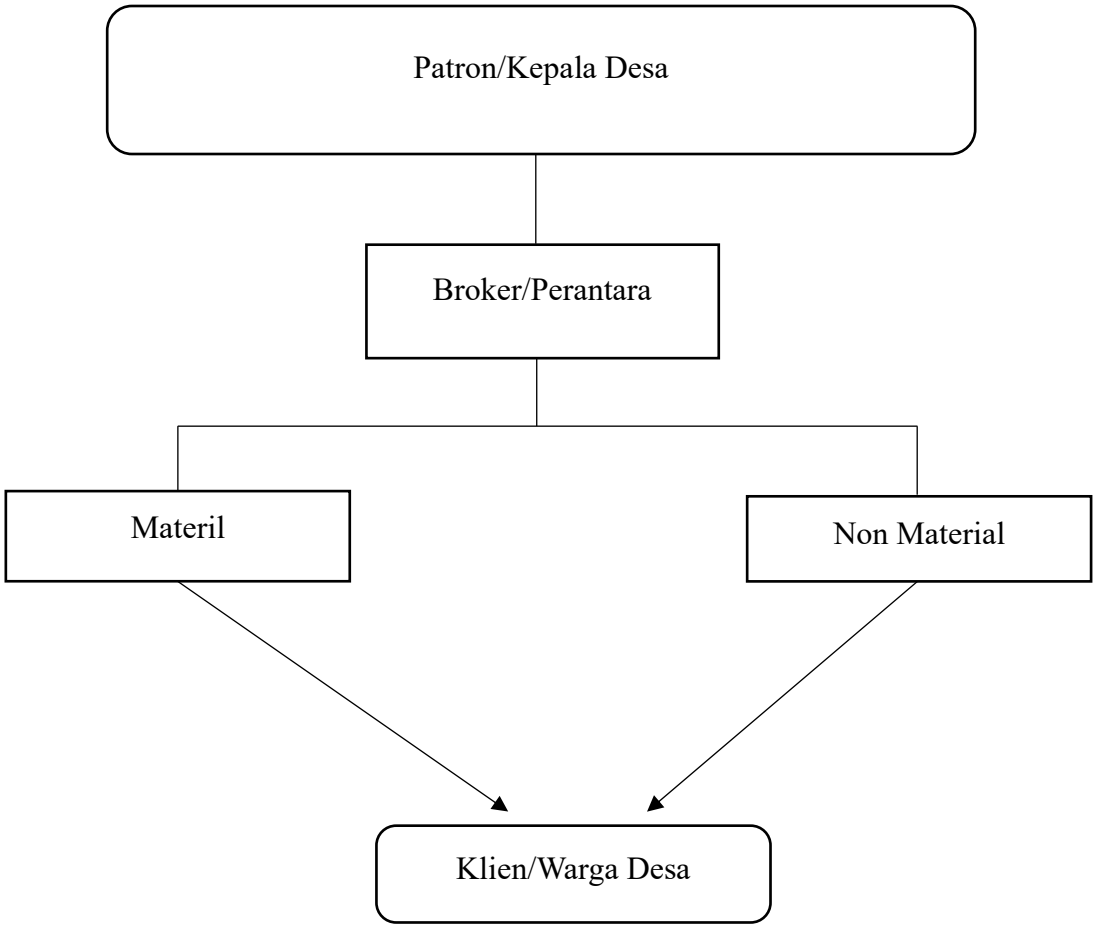

Klientalisme digambarkan sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kandidat (patron) dan masyarakat (klien). Dalam pemilihan kepala desa di Desa Nyogan, mobilisasi klientelistik digunakan untuk

memenangkan anggota keluarga. Kebebasan pemilih dapat terhambat, oleh elit penyedia dukungan yang berperan menghubungkan mereka dengan para kandidat. Biasanya kandidat memberikan barang materil atau non-materil, sementara warga desa menyediakan dukungan politik dalam bentuk suara.

Patron adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini, patron memiliki tujuan atau keinginan mencari suara guna mempertahankan kekuasaan dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian disini patron tidak bekerja sendiri untuk mencari tujuannya, maka dibentuk suatu jaringan yaitu broker atau perantara yang berfungsi tangan kanan atau pihak ketiga yang akan memberikan bantuan, seperti membagikan sumber daya dari sang patron untuk klien-nya nanti. Broker akan diperintahkan oleh patron untuk memberikan bentuk-bentuk pemberian, baik berupa material atau non-material seperti perlindungan atau dukungan. Selanjutnya yang diberikan merupakan klien atau warga Desa Nyogan. Pemberian dari patron melalui broker akan diterima klien, sehingga klien memiliki rasa balas jasa dan melakukan hubungan timbal balik kepada patron, baik berupa dukungan ataupun kepatuhan yang mempengaruhi hak suaranya.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan

aspek ilmu pengetahuan dan teori. 'Terencana' karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.[28]

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berlangsung. Penelitian ini akan memberikan gambaran bentuk dan mengapa dinasti politik masih dikuasai oleh satu keluarga di desa Nyogan. Karena penelitian ini mampu menganalisis dan menggambarkan fenomena, penyebab, dampak dan pemikiran masyarakat terhadap dinasti politik.

G.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.[29] Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang terjadi. Metode penelitian kualitatif menggunakan wawancara

---

[28] J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif "Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya"*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm.5.

[29] Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 80-81.

secara mendalam, dan observasi dalam mengumpulkan data.[30]

G.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan dinasti politik yang ada di desa Nyogan, alasan penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di desa ini karena di Kecamatan Mestong, hanya di Desa Nyogan terdapat dinasti politik yang bertahan sejak awal dibentuk sampai sekarang, kepala desa yang terus terpilih disetiap pemilihan kepala desa, memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa sebelumnya.

G.3 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian, dimana fokus penelitian bertujuan untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian terhadap pola terbentuknya dinasti politik di Desa Nyogan dan mengapa dinasti politik di desa Nyogan dikuasai oleh keluarga Harun Muhammad Dun.

G.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh di lapangan atau data pokok yang harus didapatkan. Misalnya harus diperoleh dari hasil

[30] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Yang Bersifat; Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung, ALFABETA CV, 2018, hlm.3.

wawancara langsung dengan informan/narasumber. Sebagaimana data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada terkait bentuk dinasti politik dan faktor-faktor pemicu dinasti politik dalam pemerintahan desa tepatnya di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Data ini nantinya digunakan untuk mendukung informasi primer.

G.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif, untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan), penelitian ini dilakukan *purposive samping. Purposive Sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan dilandasi tujuan dan pertimbangan tertentu terlebih dahulu (orang yang dipilih benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel).[31] Sebagai sumber data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

[31] *Ibid*, hlm. 369

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No.	Informan	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Idris	Laki-Laki	Ketua BPD Desa Nyogan
2.	Turahmi	Perempuan	Sekretaris BPD Desa Nyogan
3.	Yeni rahmawati	Perempuan	Aparatur Desa
4.	Saman	Laki-Laki	Tokoh Adat
5.	Restu apriadi	Laki-Laki	Ketua Karang Taruna
6.	Saelan	Laki-Laki	Ketua RT
7.	Wagiman	Laki-Laki	Tokoh Agama
8.	Budiono	Laki-Laki	Karyawan Swasta
9.	Hasan sani, S.Pd.	Laki-Laki	Guru
10.	Sumiati	Perempuan	Pedagang
11.	Rosmawati	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
12.	Andini adelia putri	Perempuan	Mahasiswa
13.	Mansyur	Laki-Laki	Sopir PT ASA
14.	Jumini	Perempuan	Petani

G.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Sehingga dibutuhkan adanya Teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara tepat, sesuai dengan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian. Maka penulis menggunakan beberapa

metode yang dapat mempermudah penelitian ini :

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Proses wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan.[32]

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya. Dengan dokumen ini peneliti dapat memperoleh data serta demografi penduduk, guna memenuhi kelengkapan penulisan penelitian tentang gambaran umum wilayah objek penelitian. Metode dokumentasi ini akan membantu peneliti untuk dapat membantu peneliti mengingat hal-hal yang berkaitan

[32] Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017, hlm. 231.

dengan penelitian, termasuk informasi maupun bentuk lain yang dapat di dokumentasikan.

G.7 Teknik Analisis Data

Data Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data:

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.[33]

2. Penyajian Data

   Dalam menyajikan data peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan, penyajian data merupakan kegiatan dimana ketika sekumpulan informasi telah disusun dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk

[33] Ahmad Rijali "*Analisis Data Kualitatif*," Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 17 No. 33, 2018, hlm. 91

uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Hal tersebut akan mempermudah dalam menganalisis data yang ditemukan oleh peneliti.[34]

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam menganalisis sebuah data diperlukan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan dapat menjadi fokus penelitian berdasarkan dari hasil analisis data. Data yang disimpulkan berupa dalam bentuk deskriptif dengan pedoman pada kajian penelitian.[35]

G.8 Triangulasi Data

Triangulasi diartikan sebagai pengujian data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya penulis mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. [36] Teknik pengumpulan data, peneliti akan menganalisis beragam data primer maupun sekunder untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel.

---

[34] *Ibid.,* hlm.91

[35] *Ibid.*

[36] Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA, 2017, hlm. 241